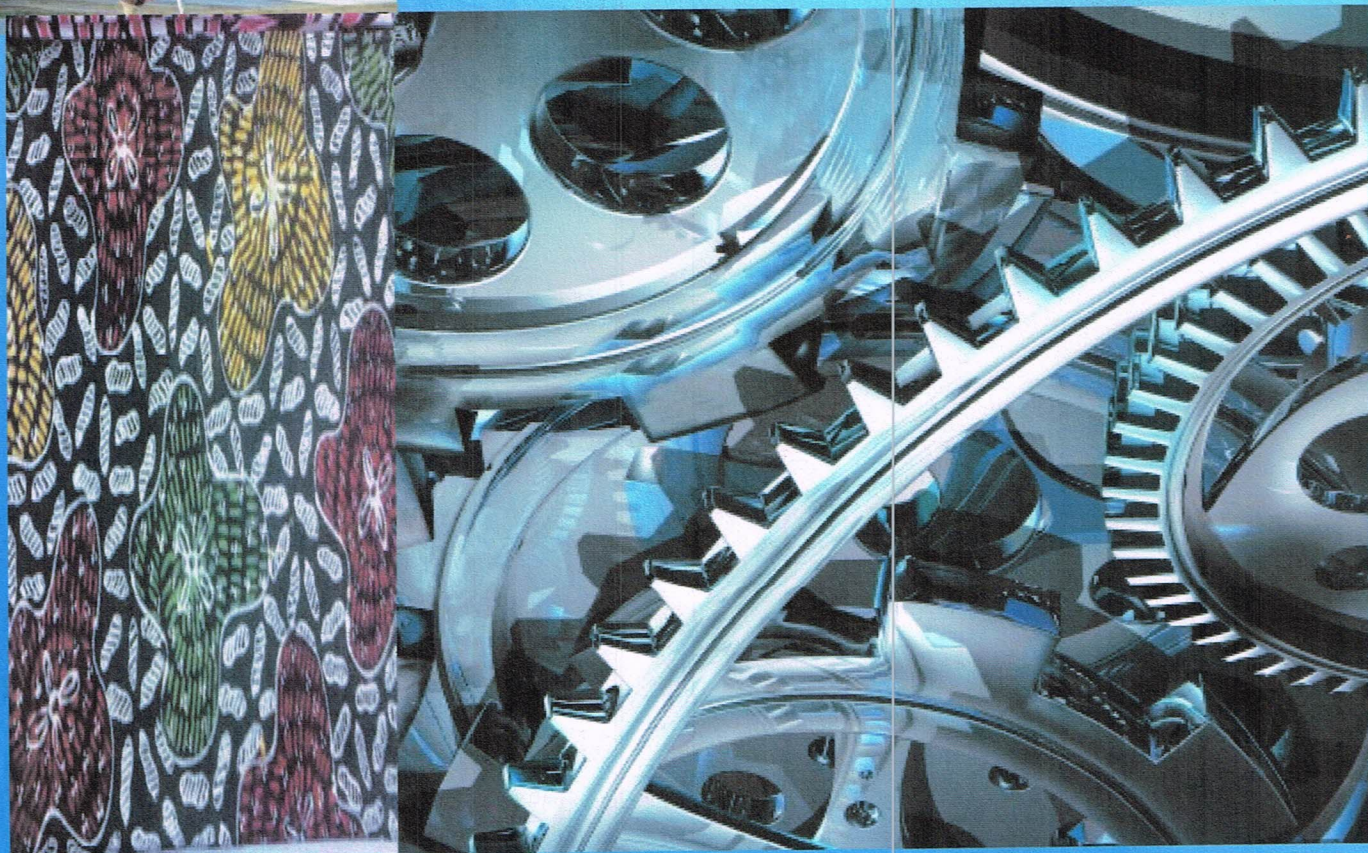


**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2018**

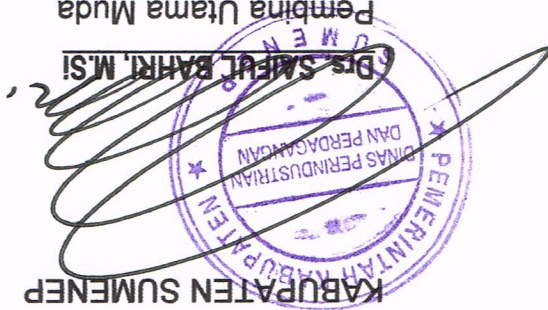
TAHUN 2017

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN SUMENEP



Pembina Utama Muda

NIP. 19661021 198602 1 002

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjabab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Berkaitan dengan hal dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menyusun Pelaporan Akuntabilitas Kinerja untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan program kerja yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan usaha dan pendapatan bagi pengusaha kecil dan menengah, meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kemampuan SDM (aparap dan masyarakat pengrajin industri kecil dan menengah).

Diharapkan melalui program kerja tersebut, akan mampu meningkatkan kesejahteraan para pengrajin/pengusaha kecil dan menengah yang merupakan sendi tumpuan perekonomian di Kabupaten Sumenep.

Semoga Penyusunan LKjIP ini bermanfaat demi peningkatan kinerja.

KATA PENGANTAR

I.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
II.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
III.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
IV.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
V.	Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan

Untuk mencapai indikator tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program pada tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Volume Perdagangan (Juta Rp)
2. Persentase pasar tradisional sehat
3. Persentase Kecukupan Kios/Stan/Los pasar untuk menampung pedagang
4. Jumlah Revitalisasi pasar desa/ tradisional

Usuran Perdagangan

1. % Pertumbuhan Industri
2. Jumlah Tenaga Kerja yang terserap di Bidang Industri
3. Jumlah nilai produksi industri
4. Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (unit)

Usuran Perindustrian

Perindustrian dan Perdagangan, sebagai berikut;

Dari Sasaran-sasaran tersebut di atas maka diperlukan indikator per urusan Dinas

“ Meningkatkan kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar ”

Perindustrian dan Perdagangan, sebagai berikut :

Dari tujuan tersebut di atas maka didapatkan Sasaran-sasaran Dinas

Perdagangan ”

“ Meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri dan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran

IKHTISAR EKSEKUTIF



- Adapun, Program-program wajib bagi tiap SKPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2016, terdiri dari :
- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - VI. Program Penyajian Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
 - VII. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
 - VIII. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai
 - IX. Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar
 - X. Program Pembinaan Industri
 - XI. Program Sosialisasi Ketentuan Dibiidang Cukai



Tuntutan masyarakat akan adanya pemerintah yang baik (*good government*) telah melahirkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kepermerintahan yang baik (*good government*), akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintah, dituntut untuk lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukannya sehingga rakyat dapat merasakan suasana kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar yang terpenuhi, hak-haknya sebagai warga negara lebih terjamin, diperlakukan secara terhormat dan adil sehingga dapat mengembangkan jati dirinya serta dapat secara optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing.

PENDAHULUAN

BAB I



Peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap laporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep tahun 2017. Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa dan beregara.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, semua instansi pemerintah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing. Akuntabilitas berarti bahwa para pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan (*Stakeholders*)

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, azas sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan *good government* yang diamanatkan, maka Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nepotisme (KKN). Dalam rangka mewujudkan *good government* yang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sebagai perangkat daerah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden diatas yang merupakan media Akuntabilitas, sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Media ini

Salah satu implementasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang handal dan profesional khususnya dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan profesional dalam menyusun strategi dan merumuskan kebijakan publik. Oleh sebab itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, kemampuan, dedikasi dan motivasi serta peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu instansi pemerintah memerlukan data dan informasi dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai bahan analisa terhadap substansi pelaksanaan pembangunan, sehingga output dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna. Disamping itu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta merupakan upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daerah secara baik dan benar, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh setiap lapisan masyarakat.

yang baik, yang dapat mendukung upaya-upaya untuk peningkatan kinerja. Pengelolaan atau manajemen tersebut harus merupakan suatu rangkaian atau siklus tahapan-tahapan kegiatan, yang dapat dibangun dengan menerapkan secara sungguh-sungguh fungsi manajemen, sekurang-kurangnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atau evaluasi.



Sebagai tindak lanjut dari keselarasan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan yang lebih bertanggung jawab, maka landasan gerak pelaksanaan mengacu pada tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep antara lain:

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

1) Kedudukan

C. GAMBARAN UMUM

LAKIP merupakan suatu bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Sebagai salah satu media atas kinerja yang telah dilaksanakan maka penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran
- 2) Untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dan masukan dalam rangka memperbaiki kinerja instansi dilindungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep di masa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

pihak terkait.

dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan oleh pihak-



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentunya mempunyai hambatan atau kendala yang menjadi kelemahan, kelemahan yang paling dominan yaitu:

1. Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada;
 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
- a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perindustrian dan perdagangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan bidang perdagangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait pelaksanaan perindustrian, perdagangan, pemberdayaan industri dan perdagangan;
 - e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas

Sumenep adalah;

. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten



Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;

D. DASAR HUKUM

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Profesionalisme pegawai;

Dari kelemahan – kelemahan diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengimbangi dengan kelebihan atau kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Profesionalisme pegawai;

Dari kelemahan – kelemahan diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengimbangi dengan kelebihan atau kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;
2. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Profesionalisme pegawai;

3. Belum terpenuhnya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
4. Belum memiliki Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan.



4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Keadukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Perencanaan

- 1. Visi
- 2. Misi
- 3. Tujuan dan Sasaran
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2016
- 1. Komitmen Kinerja Tahun 2016
- 2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 1. Urusan Perindustrian
- 2. Urusan Perdagangan
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Program Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari 15 Program dan 62 kegiatan yang tercantum dalam DPA TA. 2017 pada belanja langsung sebesar Rp. 26,030,636,441,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5,162,361,916,-. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melakukan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas sebagai pihak pertama kepada Bupati Sumenep sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selanjutnya perjanjian kinerja tersebut diturunkan kepada pejabat yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya. Perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dikemas sebagai berikut:

No	Jabatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kepala Dinas	Meningkatnya kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan revitalisasi pasar	Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	6,28%
			Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	12,18%
Total Anggaran		Rp. 26,030,636,441,-		
URUSAN PERINDUSTRIAN				
2.	Sekretaris Dinas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
		Meningkatnya Kapasitas	Persentase Kapasitas	100%

URUSAN PERDAGANGAN		Total Anggaran / Urusan		Rp. 8,495,789,692,-	
3.	Kabid. Industri	Meningkatnya Aparatur	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Prosentase Jumlah Dokumen pemerintah sesuai dengan pedoman
			Meningkatnya Pelaksanaan Hari-hari Besar	100%	Prosentase Pelaksanaan Hari-hari Besar
4.	Kabid. Pembedayaan	Meningkatnya Pembedayaan	Meningkatnya pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100%	Prosentase Pengembangan IKM
			Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri	100%	Prosentase Kemampuan Teknologi Industri
			Meningkatnya Pembinaan	100%	Prosentase Pembinaan
			Meningkatnya Pengembangan	100%	Prosentase Pengembangan
			Meningkatnya Pembinaan	100%	Prosentase Pembinaan
			Meningkatnya Pembinaan	100%	Prosentase Pembinaan
5.	Kabid. Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan	Meningkatnya Perdagangan	100%	Prosentase Perdagangan
			Meningkatnya Perdagangan dalam Negeri	100%	Prosentase Perdagangan dalam Negeri
			Meningkatnya Pembinaan	100%	Prosentase Pembinaan
			Meningkatnya Pembinaan	100%	Prosentase Pembinaan
			Meningkatnya Perdagangan	100%	Prosentase Perdagangan
			Meningkatnya Perdagangan	100%	Prosentase Perdagangan
			Meningkatnya Perdagangan	100%	Prosentase Perdagangan
			Meningkatnya Perdagangan	100%	Prosentase Perdagangan
			Meningkatnya Perdagangan	100%	Prosentase Perdagangan
			Meningkatnya Perdagangan	100%	Prosentase Perdagangan
6.	Kabid. Promosi	Meningkatnya Promosi	Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi
			Meningkatnya Promosi	100%	Prosentase Promosi



Dari uraian tabel diatas Perjanjian Kinerja pada Eselon dibawahnya di jabarkan kembali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kepala seksi.

Total Anggaran / Urusan		Rp. 17,534,846,749,-	
Prasarana Daerah	Prasarana Daerah	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan	Meningkatnya Pembinaan	100%	100%
Lingkungan Sosial	Lingkungan Sosial	100%	100%
Meningkatnya Pemberantasan	Meningkatnya Pemberantasan	100%	100%
Barang kena Cukai Ilegal	Barang kena Cukai Ilegal	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan	Meningkatnya Pembinaan	100%	100%
Industri	Industri	100%	100%



Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menangani 2 urusan, urusan Perindustrian dan Perdagangan dan menetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu Meningkatkan kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/revitalisasi pasar. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dibutuhkan dua strategi dan empat arah kebijakan yang selanjutnya diukur dengan 8 indikator Kinerja. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 menunjukkan indikator telah dicapai dengan hasil yang "baik"

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pada Bab III ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB III





1. Perbandingan antara Target Tahun 2017 dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan, dari Indikator-Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan rata-rata capaian terrealisasi termasuk dalam atribut **Berhasil**, dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1

Meningkatnya Produksi Sektor Industri dan Perdagangan

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		TAHUN 2017		
6.1	Volume Perdagangan (Juta Rp)	2,564,932.7	2,302,398.7	89.79
6.2	Persentase Pasar tradisional sehat	80	80	100.00
6.3	Persentase Kepekupan Kios/Stan/Los pasar untuk memampung pedagang	86	86	100.00
6.4	Revitalisasi Pasar Desa/Tradisional	8	8	100.00
7.1	% Pertumbuhan Industri	0,15%	0.25%	166.67
7.2	Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (unit)	33,165	33,200	100.11
7.3	Jumlah Nilai Produksi Industri	392,198,363,035	392,620,909,200	100.11
7.4	Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif	198,990	199,198	100.11

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2016

Sasaran	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Realisasi s/d. Tahun 2017	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2021	% capaian th. 2017
1	2	3	6	9	
Meningkatnya kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar	% Pertumbuhan Industri	%	0.25%	0.15%	166,67
	Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (unit)	Number	33.200	33.365	99,51
	Jumlah Nilai Produksi Industri	Rp	392.620.909.200	394.556.853.188	99,51
	Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif	Number	199.198	200.190	99,50
	Volume Perdagangan (Juta Rp)	Rp.	2.302.398,7	3.399.968,3	67,72
	Persentase Pasar tradisional sehat	%	80	95	84,21

Perbandingan Realisasi dengan Rencana RPJM

Tabel 3.3

Strategis Organisasi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan

Sasaran	INDIKATOR SASARAN	TARGET TH. 2017	TH. 2016	TH. 2017	Capaian %
1	2	3			
Meningkatnya kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar	% Pertumbuhan Industri	0.15%	0.16%	0.25%	156,25
	Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (unit)	33.165	33.117	33.200	99,11
	Jumlah Nilai Produksi Industri	392.198.363.035	391.650.049.056	392.620.909.200	100,10
	Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif	198.990	198.702	199.198	100,10
	Volume Perdagangan (Juta Rp)	2.564.932,7	2.288.787,8	2.302.398,7	93,78
	Persentase Pasar tradisional sehat	80	75	80	100
	Persentase Kecukupan Kios/Stan/Los pasar untuk menampung pedagang	86	83	86	100
	Revitalisasi Pasar Desa/Tradisional	8	2	8	349,90



usaha atau terjadi kenaikan mencapai 0,06% dari yang di targetkan. semula ditarget 33.165 unit usaha teralisasi menjadi 33.200 unit Pada tahun 2017 Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (unit)

- Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (unit) sebesar 0,15%.

dengan persentase 0,25%. atau mencapai 166,67% dari targetnya Pada tahun 2017 realisasi Pertumbuhan Industri sebesar 33.200 Dari masing-masing tahun di targetkan 50 pertumbuhan Industri.

Jumlah industri tahun yang ditargetkan lalu dikalikan seratus persen. ditargetkan di kurangi jumlah industri tahun realisasi, hasilnya dibagi Persentase Pertumbuhan Industri adalah jumlah industri tahun ymag Pengrajin, menengah dan kerajinan.

membina, mengembangkan dan meningkatkan jumlah Kelompok Indikator ini menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten dalam

- *Persentase Pertumbuhan Industri*
- diperoleh gambaran analisis sebagai berikut:
- Berdasarkan di atas sasaran tersebut didukung oleh 8 indikator sasaran

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Tahun 2017.

Berdasarkan tabel 1.3.1 di atas, dapat digambarkan bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2017 dibandingkan dengan rencana akhir RPJMD pada tahun 2021 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 96,79%, ini termasuk predikat **Berhasil**. Dari 8 indikator yang ditetapkan telah hampir memenuhi target RPJMD Tahun 2021.

Sasaran	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Realisasi s/d. Tahun 2017	Rencana sesuai dengan RPJMD Tahun 2021	% capaian th. 2017
1	2	3	6	9	
	Persentase Kecukupan Kios/Stand/Loas pasar untuk menampung pedagang	%	86	95	90,53
	Revitalisasi Pasar Desa/Tradisional	Unit	8	12	66,67



berikut:

Dalam upaya untuk menggambarkan analisa asistensi penggunaan sumberdaya dilakukan evaluasi dengan menggunakan tabel sebagai

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2017 realisasi Volume Perdagangan sebesar 2,302,398,70 targetnya sebesar 2,564,932,70. Realisasi dibagi target dikalikan seratus persen mencapai hasil 89,79 %.

Perdagangan tahun realisasi, lalu dikalikan seratus persen. Perdagangan tahun yang ditargetkan di bagi jumlah Volume Persentase Perdagangan adalah jumlah Volume Indikator ini mengalami pergerakan yang hampir mencapai target

• Volume Perdagangan (juta Rupiah)

terlaksana.

Revitaisasi Pasar Desa/Tradisional pada tahun 2017 terealisasi sebesar 8, sesuai dengan target yang ditentukan dalam arti 100%

• Revitaisasi Pasar Desa/Tradisional

teralisasi sebesar 100,11%.

Tenaga kerja yang terserap pada bidang industri kecil menengah dan kreatif pada tahun 2017 terealisasi sebesar 199,198 mengalami kenaikan 0,11% dari target yang ditetapkan sebesar 198,990 dan

• Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan pertumbuhan industri.

dengan realisasi 100,11% Kenaikan ini terjadi karena peningkatan target yang telah di tetapkan Mengalami kenaikan sebesar 0,11% 392,198,363,035.- terealisasi sebesar Rp. 392,620,909,200.- Dari Jumlah nilai produksi pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.

• Jumlah Nilai Produksi Industri

100,11%.

Dengan rincian jumlah Unit Usaha tahun 2017 terealisasi sebesar



Sumber: Bagian Keuangan Disperindag

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	ANGGARAN %
1	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor perdagangan	Volume Perdagangan (JutaRp)	10.178.136.249	39,10
		Persentase Pasar Tradisional Sehat	1.024.566.500	3,94
		Persentase Kecukupan Kios/Stan/Los pasar untuk menampung Pedagang	1.157.316.000	4,45
		Revitalisasi Pasardesa/ Tradisional	5.174.828.000	19,88
2	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor Industri	% Pertumbuhan Industri	5.299.133.692	20,36
		Jumlah Tenaga Kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif	786.876.000	3,02
3	Meningkatnya Industri Kerajinan dan Industri Ruma Tangga	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah (unit)	675.000.000	2,59
		Jumlah Nilai Produksi Industri	1.734.780.000	6,66
TOTAL			26.030.636.441	100,00

Tabel 3.4. Cost Per Outcome
Alokasi Persasaran Pembangunan





Tabel 3.5. CostPer Outcome
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah pertumbuhan industri Kecil menengah melalui pembinaan dan bantuan peralatan industri	109 IKM	109 IKM	100	2.409.760.000	2.378.079.000	98,68
2	Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah	jumlah teknologi yang diterapkan pada bidang industri	87IKM	87 IKM	100	6.086.009.692	5.866.114.125	96,39
3	Meningkatkan potensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.	Perentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100,00	84,82	85	11.694.542.809	7.163.355.747	61,25
4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan bagi pelaku usaha	100,00	72,79	73	5.840.303.940	4.250.920.891	72,79
TOTAL						26.030.636.441	19.658.469.763	75,52

Sumber: Bagian Keuangan Disperindag

2. Sasaran program meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah dengan indikator jumlah teknologi yang diterapkan pada

tingkat efisiensi sebesar 1,32 persen.

Pada sasaran ini capaian kinerja mencapai 100 persen dikurangi penyerapan anggaran sebesar 98,68 persen, sehingga menghasilkan

tingkat efisiensi dicapai melalui uraian sebagai berikut:

1. Sasaran program meningkatnya daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah dengan indikator jumlah pertumbuhan industri kecil menengah melalui pembinaan dan bantuan peralatan industri, mengalami tingkat efisiensi sebesar 1,32 persen.

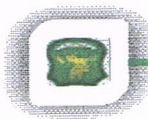
pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sumber: Bagian Keuangan Disperindag

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatkan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah pertumbuhan industri kecil menengah melalui pembinaan dan bantuan peralatan industri	100	98,68	1,32
2	Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah	Jumlah teknologi yang diterapkan pada bidang industri	100	96,39	3,61
3	Meningkatkan potensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.	Perentase efisiensi perdagangan dalam negeri	85	61,25	23,57
4	Meningkatnya Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan bagi pelaku usaha	73	72,79	0,004

Tabel 3.6. CostPer Outcome
Pencapaian Kinerja dan Anggaran



Dana yang dianggarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep untuk penyelenggaraan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Sumenep tahun 2017, dengan total rencana anggaran pada Belanja Langsung Rp. 26,030,636,441,- sesuai dengan DPPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2017.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sasaran ini capaian kinerja mencapai 73 persen dikurangi penyerapan anggaran sebesar 72,79 persen, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,004 persen.

berikut:

4. Sedangkan sasaran program meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan indikator jumlah perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan bagi pelaku usaha tingkat efisiensi sebesar 0,004. tingkat efisiensi dicapai melalui uraian sebagai

Pada sasaran ini capaian kinerja mencapai 85 persen dikurangi penyerapan anggaran sebesar 61,25 persen, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 23,57 persen.

uraian sebagai berikut:

3. Sasaran program meningkatnya potensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan indikator persentase efisiensi perdagangan dalam negeri mencapai 23,57 persen: tingkat efisiensi dicapai melalui

Pada sasaran ini capaian kinerja mencapai 100 persen dikurangi penyerapan anggaran sebesar 96,39 persen, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 3,61 persen.

melalui uraian sebagai berikut:

bidang industri mengalami efisiensi 3,61 persen. tingkat efisiensi dicapai



Sumber: Bagian Keuangan Disperindag

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	352,003,999	271,691,560	77.18
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	282,338,544	272,471,515	96.51
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31,500,000	31,500,000	100.00
4	Peningkatan Pengemangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45,112,800	45,112,000	100.00

Belanja Langsung Rutin SKPD

Sumber: Bagian Keuangan Disperindag

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Gaji dan Tunjangan	4,636,861,916	4,283,876,469	92.39
2	Tambahan Penghasilan	525,500,000	399,325,000	75.99

Belanja Tidak Langsung

Sumber: Bagian Keuangan Disperindag

NO	URAIAN	Target Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Pasar	1,749,834,779.00	1,325,058,950.00	75.72
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	426,841,188.00	264,557,000.00	61.98
3	Hasil Bunga Penguatan Modal Disperindag PM	11,000,000	290,000	2.64
	Total	2,187,675,967	1,589,905,950	72.68

Pendapatan



KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN SUMENEP



Brs. SAFUL BAHRI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661021 198602 1 002

Dari hal-hal yang telah terurai melalui bab-bab di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan program dapat dicapai dengan baik walaupun masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya dengan keterbatasan waktu, keterbatasan dalam pencairan keuangan serta untuk pembinaan di wilayah kepulauan terhambat masalah cuaca yang kurang mendukung. Pemecahan dari permasalahan dan kendala perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang agar pelaksanaan dapat lebih baik dari segi waktu, realisasi dan capaian kinerja yang akuntabel.

Selanjutnya masukan-masukan positif bagi penyempurnaan laporan ini tetap diperlukan agar tujuan penyusunan laporan ini dapat tercapai dengan lebih baik dan untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

PENUTUP

BAB IV



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ❖ Perjanjian Kinerja
- ❖ Matrik Renstra





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jl. Urip Sumoharjo No.02 Telp. (0328) 662092 – 664434
SUMENEP
 Kode Pos 69441

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DRS. SAIFUL BAHRI, M.SI**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.SI**

Jabatan : Bupati Sumenep

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumenep, Januari 2017

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMENEP
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
DR. SAIFUL BAHRI, M.SI
 Rampina Utama Muda
 NIP. 19661021 198602 1 002

Pihak Kedua,
BUPATI SUMENEP
DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.SI

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMENEP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar	1.1. Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	6,28%
		1.2. Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	12,18%

Program

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 6 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 7 Program Perindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- 8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 9 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- 10 Program Penyediaan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- 11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 12 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai illegal
- 13 Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar
- 14 Program Pembinaan Industri
- 15 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Jumlah Anggaran Belanja Langsung

DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.SI



BUPATI SUMENEP

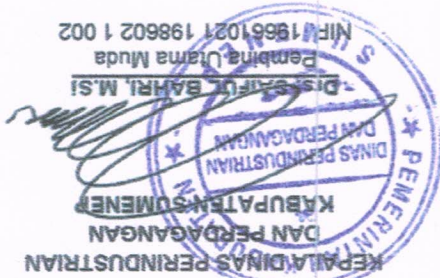
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN

Sumenep, Januari 2017

270.546.756
275.738.544
125.000.000
45.112.800
1.879.325.000
716.554.050
3.008.136.740
6.724.703.601
3.228.473.951
1.111.847.500
3.899.524.999
91.800.000
281.240.000
262.195.000
46.480.000
21.966.678.941

Anggaran (Rp)

Keterangan



DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN SUMENEP

DINAS PERINDUSTRIAN

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

Sumenep, Januari 2017

MATRICK RPJMD
TAHUN 2016 s/d 2021

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Baseline) Tahun 2015	Target Kinerja								SKPD Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Aspek Kesejahteraan Masyarakat											
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
Fokus Kesejahteraan Masyarakat											
Fokus Seni Budaya dan Olahraga											
Aspek Pelayanan Umum											
Fokus Layanan Urusan Wajib											
Fokus Layanan Urusan Pilihan											
6	Perdagangan										Disperindag
6.6	Volume Perdagangan (Juta Rp)	2.227.801,7	2.390.431,2	2.564.932,7	2.752.172,8	2.953.081,4	3.168.656,3	3.399.969,3			
6.7	Jumlah Revitalisasi pasar tradisional	2	7	8	9	10	11	12			
7	Perindustrian										Disperindag
7.2	% Pertumbuhan Industri	0,13%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%		
7.5	Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif	198.390	198.890	198.990	199.290	199.590	199.890	200.190			
7.4	Jumlah Nilai Produksi Industri	391.024.410.000	391.610.946.015	392.198.363.035	392.786.660.579	393.375.840.570	393.965.904.331	394.556.853.188			
7.3	Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah (unit)	33.065	33.115	33.165	33.215	33.265	33.315	33.365			